

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era keterbukaan informasi seperti saat ini telah mendorong publik untuk menuntut pemerintah yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Atika (2019) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Usaha mencapai terciptanya akuntabilitas kepada publik, pemerintah telah membuat regulasi yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Hendri (2020) berpendapat bahwa bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pada satu periode kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Peningkatan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD bertujuan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan hasil kinerja keuangan yang berguna bagi pemerintah daerah guna untuk mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang ditujukan untuk mengelola sumber dana (Sarino, 2021). Sehingga diharapkan untuk hasil dari LKPD harus berkualitas, kualitas dari laporan keuangan adalah tingkat baik atau tidaknya dari suatu laporan atas pengelolaan keuangan pada suatu organisasi.

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Kabupaten kudos merupakan salah satu yang yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya tahun 2018-2022. Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*) dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.1.
Perkembangan LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Tahun Anggaran	Opini BPK
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Jateng (2023).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini BPK terkait LKPD Kabupaten Kudus stagnan dari tahun 2018-2022 opini WTP. Hasil opini BPK di Kabupaten Kudus menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terjadi selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah baik dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sistem pengendalian intern. Fatimah (2022) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, tepat, akuntabel, dan lebih transparan, dapat memberikan manfaat bagi para pembuat keputusan dan para pemangku kepentingan.

Penelitian Aziyah (2022), Lestari (2020), Taviana (2020) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fathia (2020), Fatimah (2022) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Sarino (2021), Sambuaga (2020) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah komitmen organisasi. Aziyah (2022) menjelaskan bahwa komitmen organisasi menunjukkan loyalitas seorang anggota organisasi untuk tetap bertahan dalam organisasi serta keinginan untuk berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik bagi kepentingan organisasi itu sendiri. Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seseorang memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Penelitian Taviana (2020), Anggreni (2021) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ananda (2020) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Aziyah (2022), Rahmadani (2020)

menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Sarino (2021) mengemukakan bahwa banyaknya data yang dikelola dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. SIA adalah suatu sistem yang menjalankan serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik membutuhkan sistem informasi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Taviana (2020), Fatimah (2022), Wahyuni (2021) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Lestari (2020), Sarino (2021) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Arfianti (2021), Dariana (2019) menunjukkan hasil

bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pemahaman akuntansi. Wahyuni (2021) mengemukakan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum.

Penelitian Andini (2021), Saputra (2021) menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Wahyuni (2021), Lestari (2020) menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Zubaidi (2019), Atika (2019) menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan beberapa perbedaan hasil penelitian, maka penelitian ini mereplikasi penelitian Aziyah (2022) dengan beberapa perbedaan penelitian. Adapun perbedaan penelitian yang pertama yaitu menambah variabel independen pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pemahaman akuntansi. Perbedaan

kedua pada objek penelitian, sebelumnya pada seluruh OPD di Pemerintah Daerah sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyelesaikan luasnya permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, sehingga dibatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dibatasi pada sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, sistem informasi akuntansi, pemahaman akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan sumber daya manusia.
2. Objek pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan,

andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Opini BPK terkait LKPD Kabupaten Kudus stagnan dari tahun 2018-2022 opini WTP. Hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kudus menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terjadi selama lima tahun terakhir. Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?

6. Apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
7. Apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?
8. Apakah kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
5. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia dalam memediasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
6. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia dalam memediasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
7. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia dalam memediasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.
8. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia dalam memediasi hubungan antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama.
- b. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi peneliti, peneliti dapat mengimplementasikan apa yang telah peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.